

Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Keuangan Daerah

(Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Aceh Utara)

Monna Diska Sari

monna.160420224@mhs.unimal.ac.id

Murhaban*

Indrayani, Iswadi

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe Aceh.

Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh

**Corresponding Author*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Keuangan Daerah". (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Aceh Utara). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer sebanyak 68 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik purposive sampling. Metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran, (2) Penganggaran preventif berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran, (3) Pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran, (4) Secara simultan penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Kata Kunci: *Penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif fungsional, efektifitas pengendalian anggaran*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mengimplementasikan perundang-undangan bidang keuangan negara telah dikeluarkan berbagai aturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan lain-lain. Khusus berkenaan dengan pengelolaan Keuangan Daerah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir telah direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Anggaran pada prinsipnya digunakan sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian kerja, dan pengawasan kerja (Munandar, 2001:10). Anggaran semestinya direalisasikan kepada masyarakat agar perekonomian masyarakat bergerak sehingga tercipta pembangunan yang sesuai sasaran. Dalam segi tanggung jawab, pemerintah harus menerapkan sistem dan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien, agar mampu mendeteksi adanya kesalahan, kebocoran dan kegagalan yang dapat menimbulkan kerugian pada anggaran pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Pengendalian berperan sebagai suatu pedoman untuk membantu segala kegiatan agar berjalan sebagaimana mestinya. Jadi pengendalian terhadap anggaran adalah proses untuk memastikan bahwa anggaran sampai hal yang spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, efektivitas pengendalian anggaran adalah berhasil atau tidaknya tujuan dari pengendalian terhadap anggaran tersebut dilaksanakan. Efektivitas pengendalian terhadap anggaran akan meminimalisir penyimpangan dan kebocoran anggaran (Mardiasmo, 2004).

Efektifitas pengendalian anggaran di pengaruhi oleh penerapan anggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif dan pengawasan fungsional. Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja untuk mendukung terciptanya akuntabilitas pada instansi pemerintah sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dalam organisasi sektor publik harus memenuhi beberapa aspek dalam akuntabilitas kinerja (Endrayani dan Darmawan, 2014). Penyusunan anggaran berbasis kinerja didasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai atau berdasarkan visi misi yang telah ada pada suatu instansi

Penganggaran berbasis kinerja adalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2006). Dengan demikian penyusunan anggaran berbasis kinerja membutuhkan suatu sistem administrasi publik yang telah ditata dengan baik, konsisten dan terstruktur sehingga kinerja anggaran dapat dicapai berdasarkan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan. Penganggaran berbasis kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur atau indikator kinerja sebagai instrumen untuk mencapai sasaran program dan tujuan yang telah di rencanakan dan merupakan pengelolaan anggaran dan sistem penyusunan daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti juga berorientasi pada kepentingan publik (Mardiasmo, 2002).

Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan kepada publik. Untuk mendukung sistem penganggaran

berbasis kinerja maka diperlukan suatu alat ukur kinerja yang jelas dan transparan berupa indikator kinerja, selain itu juga diperlukan sasaran yang jelas agar kinerja dapat diukur sehingga dapat dinilai efisiensi dan efektivitas dari pekerjaan yang dilaksanakan serta dana yang telah dikeluarkan untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Selanjutnya efektifitas pengendalian anggaran juga dipengaruhi oleh pengawasan preventif. Pengawasan preventif dilakukan pemerintah untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan daerah yang akan membebankan dan merugikan daerah lebih besar. Sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat diawasi penggunaannya sesuai dengan peruntungannya, dan tidak terjadi lagi dana-dana yang terbuang, dan tidak terserap secara penuh. Jadi pengawasan preventif sangat berhubungan signifikan terhadap efektifnya suatu anggaran. Semakin bagus pengawasan preventif yang dilakukan maka semakin bagus pula pengendalian anggaran tersebut. Fuadi (2013) dengan hasil menunjukkan bahwa pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Pengawasan fungsional juga mempengaruhi efektifitas pengendalian anggaran. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional. Pengawasan fungsional pada pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda) atau yang lebih dikenal dengan Inspektorat yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, pada Inspektorat khususnya mengenai pengawasan fungsional pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar dapat memenuhi tujuan efektifitas pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. (Inspektorat Kota Bandung, 2008).

Berdasarkan siaran Pers yang dikeluarkan oleh Badan pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh (BPK) atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 menunjukkan bahwa masih kurangnya efektifitas pengendalian anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang di laporkan adanya temuan pada pertanggungjawaban belanja BBM/Gas pelumas dan pergantian suku cadang ada Dinas Lingkungan hidup tidak sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah, (www.Bpk.go.id, 2019).

Rendahnya Kinerja Pemerintah Daerah juga terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara yang menyebutkan bahwa Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yaitu belum terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan pemerintahan yang bersih, dan Kualitas Sumber Daya Manusia masih rendah dan belum terintegrasinya pendidikan. Arsip Kabupaten Aceh Utara, (2018).

Penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang penganggaran berbasis kinerja telah dilakukan oleh Dendi, (2017) dan Haryoto (2020), yang menyimpulkan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Selanjutnya penelitian tentang pengawasan preventif dilakukan oleh Fuadi, (2015), Dendi (2017), dan Fajri (2018), menyimpulkan bahwa pengawasan preventif berpengaruh positif terhadap penganggaran berbasis kinerja. Sementara penelitian yang mengkaji antara pengawasan fungsional terhadap efektifitas pengendalian anggaran dilakukan oleh Dendi (2017) dengan kesimpulan penelitian terdapat pengaruh antara pengawasan fungsional terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Dengan memperhatikan penjelasan dalam latar belakang, penulis mengambil judul penelitian **“Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Keuangan Daerah”**. (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Aceh Utara).

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengaruh secara parsial dilakukan dengan menggunakan statistik uji t. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model mampu menjelaskan variabel dependen secara individual. Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel independen secara parsial

terhadap variabel dependen secara statistik. Pengujian yang digunakan adalah dengan ketentuan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 0.05$ maka menerima hipotesis.

Dari hasil olah data SPSS 20,0 yang juga digunakan untuk melihat nilai t_{tabel} diperoleh dari *degree of freedom* (df) untuk uji parsial 2 arah pada sampel $df = N - k - 1$ yaitu $34 - 3 - 1 = 31$ untuk hipotesis dengan nilai t pada signifikansi 5% atau 0,05 , maka nilai t_{tabel} yang diperoleh adalah sebesar 1,701.

1. Penganggaran berbasis kinerja mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 8.290 dengan nilai signifikannya adalah 0,000, sementara nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0.05$ diperoleh nilai sebesar 1.701. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $8.290 > 1,701$ artinya secara parsial penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pengawasan preventif mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 2.116 dengan nilai signifikannya adalah 0,043, sementara nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0.05$ diperoleh nilai sebesar 1.701. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2,116 > 1,701$ artinya secara parsial pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
3. Pengawasan fungsional mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 6.577 dengan nilai signifikannya adalah 0,000, sementara nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0.05$ diperoleh nilai sebesar 1.701. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $6,577 > 1,701$ artinya secara parsial pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Hasil Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji signifikan simultan yaitu uji f, untuk menunjukkan apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (dependen).

Tabel 4.7
Uji Simultan

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.736	3	1.912	90.160	.000 ^a
	Residual	.636	30	.021		
	Total	6.373	33			
a. Predictors: (Constant), Pengawasan Fungsional, Penganggaran Berbasis Kinerja , Pengawasan Preventif						
b. Dependent Variable: Efektifitas Pengendalian Anggaran						

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah (2021)

Dari hasil olah data SPSS 20,0 yang juga digunakan untuk melihat nilai F_{tabel} diperoleh dari *degree of freedom* (df) untuk uji parsial 2 arah pada sampel 31, $df = N - k - 1$ yaitu $34 - 3 - 1 = 31$ dengan $df1 = 5$ dan $df2 = 31$ untuk hipotesis dengan nilai F pada signifikansi 5% atau 0,05 , maka nilai F_{tabel} yang diperoleh adalah sebesar 2,064.

Dari Tabel 4.7 juga dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 90.160 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 pada taraf kepercayaan 95%. Sedangkan F_{tabel} diperoleh nilai sebesar 2,064 pada $\alpha = 0.05$. dengan demikian $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $90.160 > 2,064$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0.05$. Dari Hasil uji F ini berarti menerima H_4 . Dengan demikian pengawasan berbasis kinerja, pengawasan preventif dan pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah pejabat pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Adapun lokasi penelitian ini adalah Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yaitu pada seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Aceh Utara.

Menurut Sugiyono (2015:72) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Pada 34 SKPD yang berjumlah 727 Responden.

Sampel menurut Sugiyono (2015) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu, sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Kasubbag penyusunan program, pengendalian dan Kasubbag keuangan, sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 68 Responden.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode angket, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden pada perangkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Aceh Utara.

Metode ini menggunakan penyebaran kuesioner yang telah disusun secara terstruktur, dimana sejumlah pertanyaan tertulis disampaikan pada responden untuk ditanggapi sesuai dengan kondisi yang dialami oleh responden yang bersangkutan. Pertanyaan berkaitan dengan data penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif, dan pengawasan fungsional yang berhubungan dengan efektifitas pengendalian anggaran.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Responden Dalam Penelitian

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 68 pegawai di Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Responden berjumlah 68 Responden yang terdiri dari Kasubbag Penyusunan Program dan Pengendalian, dan Kasubbag Keuangan. Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini dapat dilihat dari beberapa kriteria. Kriteria pertama yaitu karakteristik responden berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, dan Jabatan

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

No	Karakteristik	Keterangan	Jumlah
1	Usia	20-30 Tahun	6
		30-40 Tahun	20
		40-50 Tahun	34
		> 50 Tahun	8
2	Jenis Kelamin	Laki-laki	39
		Perempuan	29
3	Bagian	Kasubbag Penyusunan Program dan Pengendalian	34
		Kasubbag Keuangan	34

Sumber : Hasil Penelitian, (2021)

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah responden dengan usia 20 sampai 30 Tahun berjumlah 6 orang, responden dengan usia 30-40 Tahun berjumlah 20 orang, Responden dengan usia 40-50 Tahun berjumlah 34 orang dan Responden berusia diatas 50 Tahun berjumlah 8 orang.

Selanjutnya responden yang digunakan dalam penelitian initerdiri dari 39 orang laki-laki dan 29 reponden perempuan. Masing masing responden berasal dari Kasubbag Penyusunan Program dan Pengendalian 34 responden dan Kasubbag keuangan 34 responden.

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa yang menjadi responden pada penelitian ini adalah pegawai pada bagian Kasubbag Penyusunan Program dan Pengendalian dan kasubbag keuangan. Berikut ini data penyebaran kuesioner penelitian terhadap responden.

Tabel 4.1
Jumlah Kuesioner

Sumber data	Jumlah	Persentase (%)
Jumlah kuesioner yang di sebar	68	100
Jumlah kuesioner yang di kembali	68	100
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	68	100

Sumber: Hasil penelitian, 2021

Dari tabel 4.1 tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pengembalian kuesioner sebanyak 68 kuesioner artinya semua kuisioner yang disebar dikembalikan oleh responden sehingga tinggkat persentasenya 100%, sehingga data yang diolah adalah sebanyak 68.

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Menurut Ghozali (2005:45) Jika $r_{\text{hasil}} > r_{\text{tabel}}$ maka butir atau variabel tersebut valid. R_{tabel} dihasilkan dari *degree of freedom* (df) = n-2, dimana n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2005 :45), berarti df = 68 -2= 66, dengan tingkat signifikan 5% di dapat angka pada r tabel = 0,286 (uji satu sisi) dan 0, 338 (Uji dua sisi). Untuk lebih jelas hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas

No	Bukti Pertanyaan	R Hasil	R tabel	Keterangan
Penganggaran Berbasis Kinerja (X₁)				
1	X1.1	,872	0,338	Valid
	X1.2	,872	0,338	Valid
	X1.3	,559	0,338	Valid
	X1.4	,636	0,338	Valid
	X1.5	,917	0,338	Valid
	X1.6	,707	0,338	Valid
Pengawasan Preventif (X₂)				
2	X2.1	,470	0,338	Valid
	X2.2	,750	0,338	Valid
	X2.3	,811	0,338	Valid
	X2.4	,377	0,338	Valid
	X2.5	,911	0,338	Valid
	X2.6	,854	0,338	Valid
	X2.7	,877	0,338	Valid
Pengawasan Fungsional (X₃)				
3	X3.1	,882	0,338	Valid

	X3.2	,905	0,338	Valid
	X3.3	,532	0,338	Valid
	X3.4	,914	0,338	Valid
	X3.5	,914	0,338	Valid
	X3.6	,904	0,338	Valid
	X3.7	,955	0,338	Valid
Efektifitas Pengendalian Anggaran Keuangan (Y)				
4	Y1	,666	0,338	Valid
	Y2	,666	0,338	Valid
	Y3	,507	0,338	Valid
	Y4	,641	0,338	Valid
	Y5	,727	0,338	Valid
	Y6	,850	0,338	Valid

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2021

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.2 di atas dapat kita lihat bahwa nilai pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* merupakan nilai dari r_{hasil} . Kemudian nilai r_{hasil} dibandingkan dengan nilai r_{tabel} . Dengan nilai $\alpha = 0.05$ dan $df = N - 2 = 68 - 2 = 66$, maka diperoleh nilai r_{tabel} sebesar 0,338. Jika $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$, maka hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pertanyaan angket sah dan dapat dipercaya untuk mengambil data penelitian.

Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat konsistensi antara hasil pengamatan dengan instrument atau alat ukur yang digunakan pada waktu yang berbeda-beda. Pengujian ini menggunakan metode *Cronbach Alpha* dengan nilai sebesar 0,60. Apabila *Cronbach Alpha* dari satu variabel lebih besar dari 0,60 maka butir pernyataan dalam instrument penelitian tersebut adalah realibel. Hasil uji reabilitas dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

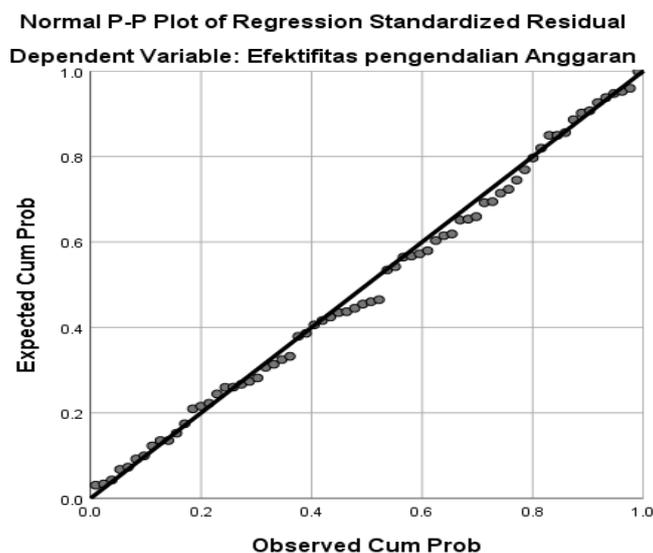
Tabel 4.3
Uji Reabilitas

Variabel	Alpha	Batasan	Keterangan
Penganggaran Berbasis Kinerja	,789	0,60	Realibel
Penganggaran Preventif	,780	0,60	Realibel
Pengawasan Fungsional	,797	0,60	Realibel
Efektifitas Pengendalian Anggaran Keuangan	,656	0,60	Realibel

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah 2021

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4.3 dapat di simpulkan bahwa untuk setiap variabel penelitian adalah reliabel, karena nilai *cronbach alpha* untuk semua variabel lebih besar dari 0,60 dengan perincian yaitu: 0,789 untuk variabel penganggaran berbasis kinerja, 0,803 untuk variabel penganggaran preventif (X_2), 0,780 untuk variabel penganggaran fungsional (X_3), 0,797 dan 0,656 untuk variabel efektifitas pengendalian keuangan (Y). Karena seluruh pertanyaan dalam kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas, maka data hasil kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk di uji lebih lanjut.

Menurut Ghozali (2006:147) uji normalitas dapat dideteksi melalui analisis grafik Berdasarkan hasil uji normalitas dengan alat bantu komputer yang menggunakan program SPSS 20.00, dapat terlihat hasil seperti pada Gambar 4.1 berikut



Gambar 4.1 grafik *normality probability plot*
 Sumber : Hasil Penelitian, diolah, (2021)

Menurut Ghozali (2006:148) mengungkapkan bahwa ketentuan grafik *normality probability plot* jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan hasil *out put* SPSS 20.0 pada Gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal maka dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi penelitian ini berdistribusi normal.

Adapun pengujian normalitas dengan menggunakan analisis statistik melalui uji *Kolmogrov Smirnov* (K-s) dengan alat bantu komputer yang menggunakan program SPSS 20.0, dapat terlihat sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Standardized Residual
N		68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.97735555
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.065
	Negative	-.032
Test Statistic		.065
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2021)

Menurut Ghozali (2006:149) mengungkapkan bahwa ketentuan uji *Kolmogrov Smirnov* (K-s) jika nilai signifikan $> 0,05$ maka distribusi data normal. Berdasarkan hasil *out put* SPSS 20.0 dari Tabel 4.4 terlihat bahwa nilai *Kolmogrov Smirnov* (K-s) adalah 0,065 dengan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 (>0.05) maka dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan yang lain. Model regresi berganda harus terbebas dari multikolinieritas untuk satu variabel dependennya. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Berdasarkan Hasil Output SPSS pengujian multikolonieritas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikoleniearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penganggaran Berbasis Kinerja	.925	1.081
	Pengawasan Preventif	.389	2.568
	Pengawasan Fungsional	.408	2.451

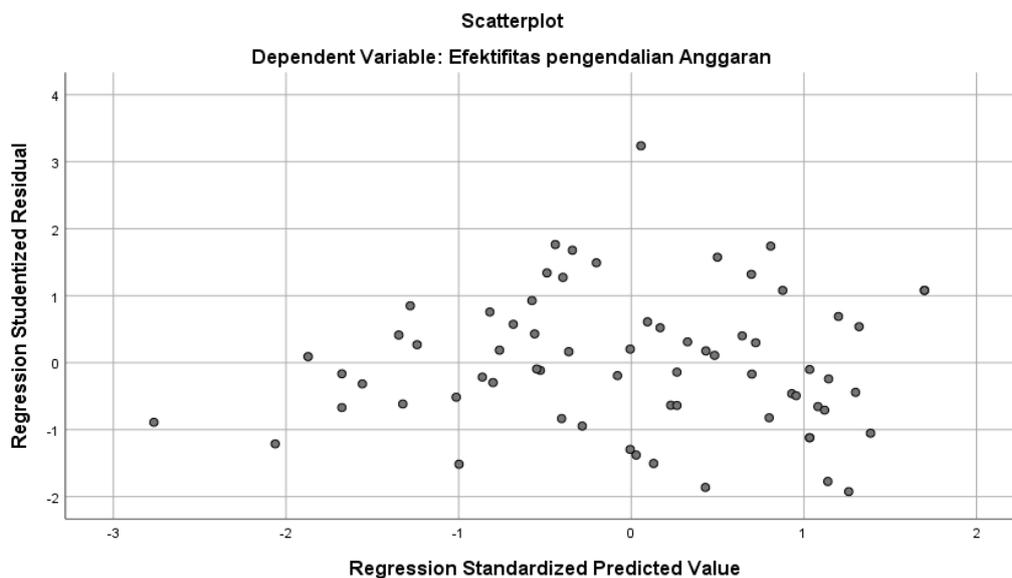
a. Dependent Variable: Efektifitas Pengendalian Anggaran

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antara variabel independen dalam model regresi dimana hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 yang berarti tidak ada kolerasi antara variabel independen. Hasil perhitungan nilai *variance inflation factor* (VIF) juga menunjukkan nilai VIF lebih kecil dari 10.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik.

Hasil *scatterplot* pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan metode grafik pada SPSS dapat dilihat dari Gambar 4.2 sebagai berikut:



Gambar 4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Hasil penelitian, data diolah 2021

Berdasarkan Gambar 4.2 maka dapat menggambarkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini berdasarkan gambar grafik dimana titik-titik yang ada dalam grafik tidak membentuk pola tertentu yang jelas dan titik-titik tersebut tersebar di atas angka 0 pada sumbu Y.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil output SPSS maka persamaan regresi linier berganda dapat dilihat seperti pada Tabel berikut ini :

**Tabel 4.6
Hasil Regresi Linier Berganda**

Coefficients ^a					
	Model	B	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.
1	(Constant)	.241	.934	1,701	.358
	Penganggaran Berbasis Kinerja	.456	8.290		.000
	Pengawasan Preventif	.119	2.116		.043
	Pengawasan Fungsional	.385	6.577		.000
a. Dependent Variable: Efektifitas Pengendalian Anggaran					

Sumber : Hasil penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas persamaan ditulis sebagai berikut :

$$Y = 0,241 + 0,456X_1 + 0,119X_2 + 0,385X_3 + e$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda dapat di intepretasikan Konstanta sebesar 0,241 artinya apabila variabel independen dianggap konstan maka efektifitas pengendalian anggaran mempunyai nilai sebesar 0,241.

Koefisien regresi penganggaran berbasis kinerja bernilai positif sebesar 0,456, jika penganggaran berbasis kinerja meningkat 1 satuan maka efektifitas pengendalian anggaran akan meningkat sebesar 0,456. Begitu pula sebaliknya jika penganggaran berbasis kinerja menurun 1 satuan maka efektifitas pengendalian anggaran akan menurun sebesar 0,456. Hal ini menunjukkan bahwa apabila penganggaran berbasis kinerja meningkat maka efektifitas pengendalian anggaran juga akan meningkat.

Koefisien regresi pengawasan preventif bernilai positif sebesar 0,119, jika pengawasan preventif meningkat 1 satuan maka efektifitas pengendalian anggaran akan meningkat sebesar 0,119. Begitu pula sebaliknya jika pengawasan preventif menurun 1 satuan maka efektifitas pengendalian anggaran akan menurun sebesar 0,119. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengawasan preventif meningkat maka efektifitas pengendalian anggaran juga akan meningkat.

Koefisien regresi pengawasan fungsional bernilai positif sebesar 0,385, jika pengawasan fungsional meningkat 1 satuan maka efektifitas pengendalian anggaran akan meningkat sebesar 0,385. Begitu pula sebaliknya jika pengawasan fungsional menurun 1 satuan maka efektifitas pengendalian anggaran akan menurun sebesar 0,385. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengawasan fungsional meningkat maka efektifitas pengendalian anggaran juga akan meningkat.

PEMBAHASAN

Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Adanya pengaruh positif antara penganggaran berbasis kinerja dengan efektifitas pengendalian anggaran menunjukkan bahwa semakin baik penganggaran berbasis kinerja maka akan semakin meningkat pula tingkat efektifitas pengendalian anggaran.

Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Selain itu, anggaran digunakan untuk memberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efektif dan efisien, tanpa ada korupsi dan pemborosan. Anggaran mempunyai beberapa fungsi bagi manajemen atau para pengelola anggaran.

Asmoko (2006) menyatakan anggaran tidak hanya berfungsi sebagai perencanaan keuangan tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja, dan motivasi. Selain itu penganggaran secara luas sebagai elemen kunci dalam sistem perencanaan dan pengendalian, sehingga anggaran memiliki peran ganda yaitu sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian. Lebih lanjut Mardiasmo (2004) menjelaskan anggaran sektor public mempunyai beberapa fungsi, yaitu alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan alat menciptakan ruang publik.

Sebagai alat perencanaan, anggaran merupakan rencana terperinci atas pendapatan dan pengeluaran yang akan dilakukan pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sebagai alat pengendalian, anggaran digunakan untuk menghindari adanya overspending, underspending dan salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asmoko (2006) menyimpulkan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektifitas pengendalian keuangan dan efektifitas pengendalian kinerja.

Pengaruh Pengawasan Preventif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Pengawasan Preventif berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Adanya pengaruh positif antara pengawasan preventif dengan efektifitas pengendalian anggaran menunjukkan bahwa semakin baik pengawasan preventif maka akan semakin meningkat pula tingkat efektifitas pengendalian anggaran.

Pengawasan preventif sangat diperlukan karena dapat menghentikan timbulnya permasalahan. Para pendesain sistem harus menekankan pengendalian mereka pada pengawasan preventif, adalah lebih ekonomis dan lebih baik bagi hubungan antara manusia untuk mencegah suatu permasalahan sebelum timbul dari pada mendeteksi dan mengoreksi permasalahan setelah terjadi. Tujuan pengawasan preventif terutama untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan anggaran.

Mardiasmo (2004:134) mengatakan bahwa efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, efektifitas pengendalian anggaran adalah berhasil atau tidaknya tujuan dari pengendalian terhadap anggaran tersebut dilaksanakan.

Pengawasan preventif dengan efektifitas anggaran saling mengikat, pengawasan detektif menurut teori merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan Berlansung dan pengawasan ini dapat dijadikan sebagai pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap anggaran, dan mencegah tidak tercapainya anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat diawasi penggunaannya sesuai dengan peruntungannya, dan tidak terjadi lagi dana-dana yang terbuang, dan tidak terserap secara penuh. Jadi

pengawasan preventif sangat berhubungan signifikan terhadap efektifnya suatu anggaran. Semakin bagus pengawasan preventif yang dilakukan maka semakin bagus pula pengendalian anggaran tersebut.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuadi (2013) yang menyatakan bahwa pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Adanya pengaruh positif antara pengawasan fungsional dengan efektifitas pengendalian anggaran menunjukkan bahwa semakin baik pengawasan fungsional maka akan semakin meningkat pula tingkat efektifitas pengendalian anggaran.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan fungsi pengawasan untuk menjamin keamanan atas kekayaan dan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini adalah dengan melakukan pengawasan fungsional, yang harus dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporannya saja. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional.

Pengawasan fungsional pada pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda) atau yang lebih dikenal dengan inspektorat yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, pada inspektorat khususnya mengenai pengawasan fungsional pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar dapat memenuhi tujuan efektifitas pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. (Inspektorat Kota Bandung, 2008).

Baswir (2000:118), menjelaskan pengendalian keuangan negara adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan. Karena yang menjadi objek pengendalian keuangan negara terutama adalah anggaran negara, maka pengendalian keuangan negara dari segi anggaran dapat pula dinyatakan sebagai segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan - penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati (2011) menyimpulkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Bandung dan dijelaskan variabel lain di luar variabel pengawasan fungsional arah hubungan positif antara pengawasan fungsional dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa semakin baik pengawasan fungsional akan membuat efektivitas pengelolaan keuangan daerah semakin tinggi. Sebaliknya, semakin tidak baik pengawasan fungsional akan membuat efektivitas pengelolaan keuangan daerah makin turun

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara parsial penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Hal ini menunjukkan bahwa apabila penganggaran berbasis kinerja meningkat maka efektifitas pengendalian anggaran akan semakin meningkat.
2. Secara parsial penganggaran preventif berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Hal ini menunjukkan bahwa apabila penganggaran preventif meningkat maka efektifitas pengendalian anggaran akan semakin meningkat.
3. Secara parsial pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengawasan fungsional meningkat maka efektifitas pengendalian anggaran akan semakin meningkat
4. Secara simultan penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Hal ini

menunjukkan bahwa apabila penganggaran preventif, penganggaran fungsional dan penganggaran preventif meningkat maka efektifitas pengendalian anggaran akan semakin meningkat

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka penulis merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambah lagi faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pengendalian anggaran.
2. Bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kota Lhokseumawe diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Andreas. 2011. **Manajemen Keuangan UKM**. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Anonim. 2009. **Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia**. <http://www.jurnal-sdm.blogspot.com>
- Asmoko, Hindri.2006. "**Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian**".Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.2,No.2, Hal. 53– 64.
- Baswir, Revisond. 2000. **Koperasi Indonesia. Edisi Pertama**. Yogyakarta: BPFE. UGM.
- Bastian, Indra. 2006. **Akuntansi Sektor Publik**, Jakarta: Erlangga.
- BPKP, 2005. **Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)**.Jakarta.
- Dendi, (2017), **Pengaruh Pengawasan Melekat, Pengawasan Fungsional, Pengawasan Preventif, Pengawasan Detektif Dan Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)**
- Endrayani , Adiputra dan Darmawan. 2014. "**Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Kehutanan Upt Kph Bali Tengah Kota Singaraja)**". Skripsi. Bali:Jurusan Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Fajri, (2018), **Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran**
- Fuadi, Arif. 2013. "**Pengaruh Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Bukit tinggi)**". Skripsi. Padang : Fakultas Ekonomi,Universitas Negeri Padang.
- Ghozali, Imam. 2015. **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS**. Semarang: Badan Peneliti Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2001. **Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta: UPP AMP YKP
- Halim, Abdul. 2010. **Dasar-Dasar Akuntansi**. Yogyakarta: UPP AMP YKP
- Halim, Abdul. 2013. **Analisis Investasi**. Yogyakarta: Salemba Empat
- Haryoto, (2020), **Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran**.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152 tahun 2011,**Tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Keuangan**.
- Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1997,**tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah**.
- Mardiasmo. 2009. **Akuntansi sektor Publik**. Yogyakarta: Andi

- Munandar, M. 2001. Budgeting, **Perencanaan Kerja Pengkoodinasian Kerja. Pengawasan Kerja**. Edisi Pertama. Universitas Gajah Mada: BPFE
- Pratama, Dafitra. 2014. “**Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasa Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pelalawan)**”. Skripsi. Riau: Fakultas Ekonomi.Universitas Riau.
- Pendlebury, 2000*, Akuntansi Manajemen, Edisi Kedua, terjemahan : A. Hermawan, Erlangga, Jakarta.
- Revrisond Baswir. 2000. **Akuntansi Pemerintahan Indonesia**. Yogyakarta: BPFE
- Sugiyono. 2015. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, Sonny. 2010. **Manajemen Keuangan Pemerintah**, edisi pertama. Graha ilmu.
- Wati,Suhenda, 2011.”**Analisis Atas Pengawasan Fungsional Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Inspektorat Kota Bandung**”.(Online),(elib.unikom.ac.id/download.php?id=77691)
- Widjaja, Gunawan. 2004. **Otonomi Daerah dan Daerah Otonom**. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.